BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kerja Praktek

Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang didasarkan pada asas desentralisasi atau lebih dikenal dengan otonomi daerah.Otonomi daerah berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan secara pribadi,peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi ,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperkuat Pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya.

Oleh karena itu "Penyelenggaraan otonomi daerah ini harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat". Untuk itu Otonomi Daerah dapat diharapkan sebagai berikut :

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
2. Meningkatkan kualitas layanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Membudayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pada era globalisasi pada saat sekarang ini perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan sangatlah pesat, hal ini dikarenakan seiring dengan berkembangnya teknologi dan informinasi sehingga akan membuka wawasan kita

mengenai paradigma pada kehidupan masa yang akan datang terutama dalam bidang hal Ekonomi dan khususnya Akuntansi.

Perkembangan perekonimian di arahkan untuk mancapai masyarakat yang sejahterea baik lahir maupun batin, dimana pembangunan ekonomi sebagai penggerak utama seiring dengan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras, serasi dan keberhasilan-keberhasilan pembangunan yang telah di capai. Dalam bidang ekonomi tersebut tentunya tidak lepas dariadanya peran serta masing-masing ekonomi yaitu misalnua Badan Umum Milik Negara (BUMN), dan Badam Usaha Milik Swasta lainnya (BUMS) serta peran masyarakat lainnya. Salah satu yang berperan dalam membanunkan pereokonomian adalah system perdagangan pasar tradisonal, Pasar tradisonal merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta di tandai dengan adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun oleh pengelola pasar. Kebanyakan penjual menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan yang berupa sayur mayor, buah-buahan, daging, ikan, pakaian dan barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu ada yang menjual kue-kue dan barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak di temukan di Indonesia dan khususnya di kota Cimahi pasar tadisonal umumnya terletak di kawasan dekat perumahan yang padat, hal ini untuk mempermudah pembeli untuk mencapai pasar. Sementara itu, ditingkat daerah (provinsi dan kabupaten/kota) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 pemerintah daerah disyaratkan untuk membuat dokumen perencanaan daerah yang terdiri atas PROPEDA (RENSTRADA).

Dokumen perencanaan daerah tersebut diupayakan tidak menyimpang dari PROPENAS dan RENSTRA yang dibuat pemerintah pusat. Dalam PROPEDA dimungkinkan adanya penekanan prioritas program pembangunan yang berbeda antara daerah satu dengan daerah lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. PROPEDA dibuat oleh pemerintah daerah bersama-sama DPRD dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun yang kemudian dijabarkan pelaksanaannya dalam kerangka tahunan. Rincian untuk setiap tahunnya digunakan sebagai masukan dalam penyusunan REPETADA dan APBD.

Dalam waktu kurun lima tahun (1996-2000), PDRB berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan sebesar 16,02% per tahun. Sedangkan PDRB perkapitanya meningkat 13,49% per tahun, dengan pertumbuhan ekonomi yang cenderung perttumbuhan negative sebesar 2,20% per tahun. Hal ini terkait dengan kondisi krisis ekonomi yang menimpa semua sektor, terutama si sektor perdagangan.

Sektor perdagangan memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di kota Cimahi, bidang perdagangan menempati urutan ke tiga setelah industri manufaktur dan jasa. Kota

Usaha perdagangan tidak daoat dipisahkan dengan adanya keberadaan pasar tradisonal, karena sebagian besar usaha perdagangan di Cimahi bertempat dibeberapa pasar tradisional. Oleh karena itu Pemerintah daerah kota Cimahi dalam usaha untuk meningkatkan perdagangan di kota Cimahi juga harus memperhatikan kondisi pasar.

Segmen pasar tradisional yang di dominasi oelh masyarakat kelas bawah hal ini dikarenakan harga barang-barang pasar tradisonal yang sangat terjangkau

dan pasar tradisonal menjadi bagian dari kegiatan perekonomian. Namaun seiringan dengan perkembangan waktu, keberadaan pasar tradisonal mulai mengalami kemunduran, hal ini dapat di ligat dari kondisi fisik pasar yang bangunanya mulai mengalami kerapuhan kondisi jalan di sekitar pasar tradional yang becek dan rusak dan tempat pembuangan sampah sementara terletak berdekatan di dekat pasar. Hal ini menyebabkan pembeli enggan membeli atau mengunjungi pasar tradisonal. Ditambah lagi dengan keberadaab pasar swalayan yang lebih modern dan tetata rapi yang menyebabkan pasar tradisonal semakin tergeser. Karena selaijn menyediakan kebutuhan pokok seperti pada pasar tradisnal, di pasar swalayan pengunjung memperoleh kenyamanan, sehingga pengunjung lebih menyukai berbelanja di pasar modern, dan pasar tradisonal menjadi sepi. Jika hal ini terus berlangsung maka kondisi perekonomian para pedagang di padsar tradisonal semakin terpuruk karena sebagian besar para pedagang menggantungkan kehidupannya di sector perdagangan.

Perkembangan perekonomian dtujukan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera,dimana pembangunan ekonomi sebagai penggerak utama untuk mensejahterakan masyarakat seiring dengan kualitas SDM dan bidang lainnya yang dilaksanakan seimbang, dengan keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dalam bidang ekonomi tersebut.Tentunya tidak lepas dari adanya peran serta masing-masing pelaku, dalam perdagangan terutama tentang pasar tradisonal dan lembaga milik Negara lainnya, dan serta peran masyarakat yang terlibat di dalamnya

Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada daerahnya untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat yang didasarkan pada asas desentralisasi atau lebih dikenal dengan otonomi daerah. Otonomi daerah ini akan berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan secara pribadi,peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memperkuat Pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya

Salah satu pihak yang berperan dalam mengembangkan perekonomian adalah dalam sector perdagangan pasar tradisonal. perdagangan merupakan suatu proses untuk pengembangan ekonomi masyaraka agar sejahtera. Oleh karena itu Dinas perdagangan Pemerintah Kota Cimahi mempunyai andil besar dalam proses pengembangan masyarakat atau warga khususnya yang tinggal di Kota Cimahi baik dari segi ekonomi maupuan dari segi SDM. Dalam hal perkembangannya, untuk menunjang aktivitas perekonomian sehari-hari guna melayani kebutuhan masyarakatnya, kota Cimahi mengalami pertumbuhan sarana dan prasarana baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pertumbuhan prasarana perdagangan di kota Cimhahi cenderung terpusat di wilayah Cimahi tengah dengan presentase sebesar 42%, wlayah Cimahi utara hanya sebesar 33% dan di wilayah Cimahi selatan hanya sebesar 25%. Sedangkan bila dilihat dari jenis usaha sarana dan prasarana perdagangan yang ada di kota Cimahi, jenis uasaha perdagangan barang memiliki presentase yang cukup dominan dengan presentase sebesar 81%.

Anggaran merupakan suatu pendekatan yang formal dan sistematis dari pada tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Sedangkan penganggaran merupakan proses atau metoda untuk

mempersiapkan suatu anggara. Penganggaran dalam suatu organisai sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung naunsa politik.

Dari pengertian anggaran yang telah di utarakan di atas dapat diketahui bahwa anggaran meruoakan hasil kerja (out put) terutama taksiran-taksiran yang akan dilaksanakan di waktu yang akan datang. Karena suatu anggaran merupakan hasil kerja (out put) maka anggaran dituangkan dalam suatu naskah susunan yang disusun secara teratur dean sistematis. menjelaskan kegiatan yang tercakup dalam anggaran sebagai berikut :

a. Pengumpiulan data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggarn.
b. Pengelolaan dan penganalisaan data dan informasi untuk mengadakan taksiran-taksiran dalam rangka menyyusun anggaran.
c. Menyusun anggaran serta menyajikannya secara teratur dan sistematis.
d. Pengkoordinasian pelaksanaan anggaran.
e. Pengolahan dan penganalisaan data tersebut untuk mengadakan interpretasi dalam memperoleh kesimpulan-kesimpulan dalam rangka mengadakan penilaian terhadap kerja yang telah dilaksanakan.

Untuk bisa penaksiran secara lebih akurat, diperlukan sebagai data, informasi dan pengalaman yang merupakan factor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menyusun anggaran.

Anggaran adalah organisasi ekonomi dengan keanggotaan sukarela. Maksudnya, dengan kebebasan masuk dan keluar menurut peraturan yang ada baik dari kalangan konsumen maupun produsen, perorangan, maupun kelompok, yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan mengambil manfaat-manfaat yang diusahakan dengan kerjasama kekeluargaan.

Salah satu bentuk koperasi adalah koperasi karyawan yaitu koperasi yang beranggotakan karyawan-karyawan satu perusahaan dimana koperasi karyawan itu berada. Pada dasarnya anggaran yang bermanfaat dan realitis tidak hanya membantu mempercepat kerja sama karyawan, memperjelas kebijakan dan merealisasikan rencana kerja, tetapi juga dapat juga menciptakan keselarahaan yang baik dalam perusahaan. Untuk melaksanakan perencanaa anggaran tentu saja dilakukan dengan proses yang matang. Dengan demikian dari gambaran tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan ytang baik dan hanya dapat diperoleh manajemen dengan mempelajari, menganalisa dan mempertimbangkan dengan seksama.

Adapun kegunaan anggaran yaitu :

1. Anggaran disusun untuk membantu manajemen dalam kegiatan perencanaan dan pengawasan.
2. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang.
3. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapt di dalam perusahaan dapat saling menunjang, saling bekerja sama dengan baik, untuk menuju kearah sasaran yang telah ditetapkan.
4. Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur, sebagai pembanding untuk menilai (evaluasi).

Didalam prosedur dan pelaksanaan penyusunan anggaran terdapat beberapa tahap diantarany rencana anggaran dituangkan dalam kerangka acuan kerja. Diodalamnya terdapat latar belakang penyusunan anggaran, maksud dan tujuan penyusunan anggran, sasaran anggaran jumlah anggaran dan waktu pelaksanaan. Sebeleum RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) di buat terlebih dahulu disusun rencana strategic dari program kegiatan yang akan di buat sehingga untuk menentukan tujuan program kegiatan,sasaran kegiatan dan indikatornya,cara pencapaian dan sasaran yang tertuang dalam kebijakan dan program. Rencana Strategik biasanya sudah disusun perlima tahun. Untuk pelaksanaan pertahunnya dibuatkan rencana kerja tahunan. Dalam Renja (Rencana Kerja) tahunan dibuat lebih spesifikasi dari sasaran program berupa uraian kegiatan dan indicator sasarannya, serta target sasaran program. Diuraikan pula dalam Renja (Rencana Kerja) input dari kegiatan yang akan dilaksanakan bisa berupa dana ,SDM, dll. Output yang dihasilkan harus jelas dari kegiatan yang dilaksanakan. *Outcom* merupakan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut, *Benefit* merupakan timbale balik atas dilaksanakannya bkegiatan dari sasaran kegiatan, Impack atau dampak terhadap sasaran dengan dilaksanakannya kegiatan yang dimaksud dalam penyusunan anggaran pasar tradisonal di Dinas Kopindagtan di pusatkan di bidang Perindustrian ,Perdaganan dan Pariwisata. Seksi perdagangan dan perlindungan Konsumen dengan program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negri, kegiatan pengembangan pasar dan Distribusi barang/produk. Capaian Program ini ada 2 (dua) beberapa tujtun pencapaian di Dinas Kopindagtan yang antara lain :

1.Meningkatkan pelayanan pasar

2.Terciptanya pasar tradisonal dengan konsep manajemen pasar modern.

Tertatanya pasar tradisonal dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Meningkatkan kepuasan masyarakat baik pedagang maupun pembeli Setelah Renstra (Rencana Strategik), Renja (rencana Kerja) tahunan tersusun dibuat rencana kerja anggaran (RKA) yang didalamnya tersusun rencana anggaran biaya yang akan dikeluiarkan sebagai kebutuhan dari kegiatan di pasar tradisonal. RKA ini harus disusun dengan persetujaun dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA),Bagian pengendalian pembangunan, sekda,bagian asset sekda dan bagian keuangan sekda. Adapun masalah dalam pelaksanaan anggaran itu memakan banyak waktu yang cukup lama, oleh karena itu dalam pelaksanaan penyusunan anggaran harus terkoordinasi dengan baik, hal ini agar tidak menimbulkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

Setelah disetujui RKA belum bisa di gunakan sebelum adanya persetujuan dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Setelah persetujuan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) maka RKA (Rencana Kerja) akan diubah menjadi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggara dan DPA pun harus disahkan oleh DPRD.

Setelah proses pengesahan selesai maka anggran yang telah di rencanakan dapat di cairkan untuk pelaksanaan kegiatan dan anggran ini adalah anggran habis unutk satu tahun. Prakter kerja ini dilakukan untuk mengetahhui bagaimana posedur penyusunan anggaran dan pelaksanaan penyusunan anggaran di Pemerintah Daerah Kota Cimahi, yang dikarenakan penulis untuk mengetahui proses langsung bagaimana tahap-tahap prosedur prosedur anggaran di

Pemerintah daerah kota Cimahi tepatnya di bagian Dinas Diskopindagtan (Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata,) oleh karena itu penulis ingin menulis laporan yang berjudul **“ PENYUSUNAN ANGGARAN PADA PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI”**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Peraktek

Dalam melakukan kerja praktek dalam hal pelaksanaan penyusunan anggaran pasar tradisonal di pemerintah kotaCimahi ini, terdapat tata cara yang, yang sudah ditetapkan. Sehingga daemi kelancaran inilah terdapat maksud dari kerja praktek yang dilakukan.

A. Maksud Kerja Praktek

Maksud penulisan dalam melaksanakan kuliah Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui lebih dalam tentang aktivitas-aktivitas yang sebenarnya di suatu instansi Pemerintahan khusunya di Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi yang terutama di bagian Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata. Serta untuk mengunpulkan data seperti prosedur penyusunan anggaran pasar tradisonal di kota Cimahi.

B. Tujuan Kerja Praktek

Sedangkan tujuan kerja praktek bagi penulis adalah sebagai :

1. Untuk mengetahui prosedur penyusunan anggaran pasar tradisional pada Pemerintah daerah kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penyusunan anggaran pasar tradisional pada pemerintah daerah kota Cimahi.

1.3 Kegunaan Kerja Peraktek

Hasil kuliah kerja praktek bagi penulis di tujukan oleh penulis adalah agar dapat memeberikan sumbangan informasi baik bagi perusahaan yang diteliti dan masyarakat :

1. Penulis

   Laporan kerja praktek ini sangat berguna bagi penulis, karena penulis diajrkan bagaimana cara menyusun prosedur penyusunan anggaran, yang terutama mulai dari aktifitas pengajuan anggaran kegiatan sampai menerima ajuan dari BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu), selain itu penulis juga ikut dalam bersosialisasi dalam cara pemasangan tabung gas elpiji yang baik dan benar.

2. Instansi

   Untuk istansi tersendiri dengan adanya Kerja Praktek para pegawai sangat terbantu dalam menyusun prosedur penyusunan anaggaran dan pada waktu ada kegiatan bersoialisasi tabung gas elpiji para pegawai dapat beban dalam membawa tabung-tabung gas elpiji dan kompornya.

3. Fakultas ekonomi

   Untuk Fakultas Ekonomi. Kegiatan kerja praktek ini bermanfaat untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa tentang bagaimana dunia kerja yang sebenarnya, dengan menerapkan ilmu yang selama ini di dapat di bangku kuliah dan mempraktekannya di dunia kerja yang sebenarnya. Sekaligus memperkenalkan mahasiswa-mahasiswanya ke dunia kerja.

   Untuk UNIKOM kegunaan Kerja praktek dibagi menjadi 2 yaitu

a. Program studi akuntansi (Prodi), program studi ini sangat berguna bagi mahasiswa karena ini termasuk dalam nata kuliah, yaitu mata kuliah akuntansi sector publik. Akuntansi Sektor Publik juga dapat didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara seperti BUMN/BUMD dan Yayasan-yayasan lainnya

b. Untuk Fakultas Ekonomi,

   Manfaat yang di langsung yang di peroleh bagi Fakultas Ekonomi adalah untuk fakultas ekonomi itu sendiri yaitu dapat menumbuhkan SDM (Sumber daya manusia) khususnya bagi mahasiswa yang dapat dipertanggung jawabkan bagi Fakultas dan UNIKOM itu sendiri. Selain itu kegunaan kerja praktek ini dapat menjadi acuan untuk membandingkan proses pengajaran agar Kurikulum yang selama ini di terapkan oleh fakultas apakah kebih efektif atau tidak.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyusunan laporan ini adalah menggunakan metode *Block Release,* yaitu dimana penulis melakukan pengamatan secara langsung untuk mempelajari kegiatan-kegiatan mengenai masalah yang akan penulis bahas dengan terjun langsung pada kegiatan yang diteliti dengan mengumpulkan data-data untuk penulis yang dibutuhkan dari perusahaan.

Selain itu dalam pengumpulan data dan informasi sebagai bahan pendukung dalam penyajian laporan ini adalah :

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

   Studi lapangan (*Field Research*) dalam pelaksanaan kerja praktek ini dapat dilakukan melalui Obsevasi, Wwancara dan Dokumentasi.

   a. Pengamatan (*Observation*)

      Penulis melakukan pengamatan secara langsung dibagian Dinas Perdagangan dan mempelajari kegiatan-kegiatan yang mengenai masalah perdagangan yang khususnya tentang prosedur penyusunan anggaran pasar tradisonal. Selain itu penulis mengamati langsung cara bersosialisasi dengan masyarakat tentang tata cara penggunaan gas elpiji yang benar.

   b. Wawancara (*Interview*)

      Wawancara ini mengumpulkan data dengan mengumpulkan informasi-informasi yang di dapat dengan mengajukan pertanyaan kepada Ibu Lilis Herlina selaku Staf di bagian Dinas Perdagangan, sehingga mendapatkan informasi yang jelas.

   c. Dokumentasi *(document)*

      Bukti-bukti dan dokumen-dokumen pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian seperti pengajuan kegiatan dan mengajukan anggaran, menerima SP2D (Surat perintah Pencairan Dana) dari BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk mengambil dana dari Bank. Yang diperlukan penulis untuk djadikan bahan dalam pembuatan laporan kerja praktek.

2. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mencari data, dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari dan meneliti bahan bacaan yang ada di perpustakaan untuk mengetahui masalah yang dibahas. Juga catatan-catatan dan teori pribadi yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan. Pengumpulan data ini terdapat pada buku Akuntansi Sektor Publik dalam penganggaran sektor publik.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan prosedur dan penyusunan anggaran pasar tradisonal ini penulis melakukan penelitian dengan terjun langsung ke pasar-pasar tradisonal di kota Cimahi yang akan dituju untuk melaksanakan kerja praktek ini. Adapun lokasi dan waktu kerja praktek yang tertera dibawah ini :

A. Lokasi pelaksanaan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kera Praktek ini adalah atau adalah di Jl. Raden Demang Hardjokusumah 40513 Gedung C lantai 3 Telp (022) 665 1816.

Pemerintah Kota Cimahi

B. Waktu Pelaksanaan

Adapun pelaksanaan Kerja Praktek ini dilaksanakan dari Bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2010.

Tabel 1.1

Aktivitas Kerja Praktek

No	Aktivitas	Hari	Waktu
1	Aktivitas Kerja Praktek	Senin - Jum’at	08.00 - 16.00 WIB
2	Istirahat	Senin - Juum’at	12.00 – 13.00 WIB
3	Libur	Sabtu - Minggu	-

Tabel 1.2

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

NO	KEGIATAN KP		BULAN & TAHUN						
			JUNI '10	JULI '10	AGT '10	SEPT '10	OKT '10	NOV '10	DES '10
I	**Persiapan KP**								
	1	Permohonan Ijin Kp							
	2	Realisasi Ijin KP							
	3	Menentukan Tempat Kp							
	4	Mendapat surat penerimaan							
	5	Mendapat Absen untuk KP							
II	**Pelaksanaan KP**								
	1	Aktivitas KP							
	2	Bimbingan di tempat KP							
III	**Pelaporan KP**								
	1	Konsultasi							
	2	Mulai Bimbingan							
	3	Pembuatan Laporan							
	4	Ujian KP							
	5	Selesai Pelaksanaan							